

## Dampak Pariwisata Terhadap Masyarakat Lokal di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

Gede Aldi Cahya Wiguna <sup>a,1</sup>, I Putu Anom <sup>a,2</sup>, Made Sukana <sup>a,3</sup>

<sup>1</sup>[aldicahyaaa14@gmail.com](mailto:aldicahyaaa14@gmail.com), <sup>2</sup>[putuanom@unud.ac.id](mailto:putuanom@unud.ac.id), <sup>3</sup>[madesukana@unud.ac.id](mailto:madesukana@unud.ac.id)

<sup>a</sup> Program Studi Pariwisata Program Sarjana, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Jl. Sri Ratu Mahendradatta Bukit Jimbaran, Badung, Bali

### Abstract

*This study aims to analyze the impact of tourism on the local community in Batur Selatan Village, Kintamani Sub-district, Bangli Regency. The village has become a prominent tourist destination due to its natural beauty and preserved local culture. Using a qualitative approach, data were collected through field observation, in-depth interviews with local residents, village officials, forest area managers, as well as literature review and documentation. The findings indicate that tourism has brought positive impacts such as increased income, expanded employment opportunities, the growth of local economic enterprises, and improved village infrastructure. However, several negative impacts were also identified, including social inequality, dependency on the tourism sector, cultural value shifts, and environmental pressures such as forest degradation and increased waste. These findings highlight the need for sustainable tourism management that actively involves the local community to minimize negative effects and ensure that the benefits of tourism are distributed fairly among all segments of the population. Furthermore, the study reveals a transformation in the socio-economic structure of the village, where traditional livelihoods such as farming have increasingly been replaced by tourism-related work. This shift has led to a redefinition of local identity and community relations, especially among younger generations. The commodification of culture for tourist consumption has also sparked concerns about authenticity and cultural preservation. Environmentally, the unregulated growth of tourism infrastructure poses a serious threat to the ecological balance of the village's forested areas, which are central to its attraction. Therefore, this research underlines the importance of integrated planning, community-based tourism models, and regulatory policies that prioritize environmental conservation and cultural sustainability. A participatory approach is essential to maintain harmony between tourism development and the traditional values of the community, in line with the principles of sustainable and inclusive development.*

**Keywords:** Tourism impact, local community, economy, socio-cultural, environment, Batur Selatan Village

## I. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang tidak hanya berperan sebagai penggerak perekonomian, tetapi juga memberikan pengaruh yang luas terhadap struktur sosial, budaya, dan lingkungan suatu wilayah. Pariwisata bukan semata-mata kegiatan perjalanan atau rekreasi, melainkan juga bagian integral dari dinamika pembangunan daerah yang mampu menggerakkan sektor-sektor lainnya, seperti pertanian, industri kreatif, perdagangan, hingga konservasi budaya dan alam. Dalam konteks pembangunan nasional, pariwisata telah terbukti memberikan kontribusi besar melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya (Wahab, 2008). Selain itu, pariwisata juga berperan dalam menciptakan hubungan sosial lintas budaya serta memperluas akses terhadap infrastruktur dasar di daerah-daerah terpencil. Menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2010–2025, pengembangan pariwisata diarahkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penguatan destinasi, pemasaran, dan pengelolaan

pariwisata secara berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dari segi kuantitas kunjungan wisatawan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal.

Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, merupakan salah satu destinasi wisata di Bali yang mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan potensi utama Gunung dan Danau Batur, serta kekayaan budaya lokal yang masih terjaga, desa ini menjadi salah satu tujuan favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kawasan ini juga masuk dalam zona penyangga *Geopark* Batur yang telah diakui *UNESCO*, menjadikannya tidak hanya sebagai objek wisata rekreasi tetapi juga sebagai wilayah konservasi dan edukasi geologi, budaya, dan lingkungan. Seiring meningkatnya arus kunjungan wisatawan, sektor pariwisata di desa ini telah menciptakan berbagai peluang ekonomi, seperti usaha kuliner, *homestay*, jasa pemanduan wisata, penyewaan kendaraan wisata seperti *ATV*, serta perdagangan cendera mata lokal. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi

masyarakat dari sektor primer (pertanian dan perkebunan) ke sektor tersier (jasa dan pariwisata).

Namun, perkembangan pesat sektor pariwisata tidak lepas dari berbagai konsekuensi yang muncul di tengah masyarakat. Dampak ekonomi yang ditimbulkan memang memberikan keuntungan bagi sebagian kelompok masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan dan terciptanya lapangan kerja. Akan tetapi, tidak semua masyarakat lokal mampu mengakses atau memanfaatkan peluang tersebut secara setara. Masih terdapat kelompok masyarakat, terutama yang berlatar belakang sebagai petani tradisional, yang belum merasakan dampak ekonomi secara langsung karena keterbatasan akses terhadap modal, pendidikan, serta pelatihan keterampilan pariwisata. Disisi lain, keberadaan investor luar yang membuka usaha berskala besar sering kali memonopoli keuntungan dan menciptakan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha lokal. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, marginalisasi kelompok masyarakat tertentu, serta meningkatnya ketergantungan terhadap sektor pariwisata sebagai satu-satunya sumber penghidupan.

Secara sosial budaya, pergeseran orientasi mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor jasa wisata juga membawa perubahan pada struktur sosial masyarakat. Terjadi transformasi nilai dan pola hidup, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan konflik sosial atau melemahnya kohesi sosial antar warga, terutama jika proses transisi ini tidak diikuti dengan kesiapan sosial dan pendidikan yang memadai (Lazuardina & Ghassani, 2023). Fenomena ini juga memunculkan adanya kesenjangan generasi, di mana kelompok muda cenderung meninggalkan tradisi pertanian dan lebih tertarik pada gaya hidup modern yang diasosiasikan dengan industri pariwisata. Selain itu, interaksi yang intensif antara masyarakat lokal dan wisatawan juga berpotensi menimbulkan proses komodifikasi budaya, di mana nilai-nilai adat dan praktik budaya lokal dipertunjukkan semata-mata demi kepentingan komersial, sehingga mengikis makna sakral dan identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun (Sudiartini dkk, 2020). Jika tidak dikelola secara bijak, proses ini dapat menimbulkan dilema antara pelestarian budaya dan kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Dari sisi lingkungan, peningkatan aktivitas wisata yang tidak dibarengi dengan perencanaan ekologis dapat memberikan tekanan serius terhadap daya dukung alam. Beberapa dampak nyata yang mulai terlihat di Desa Batur Selatan adalah meningkatnya volume sampah, alih fungsi lahan pertanian menjadi fasilitas wisata, serta degradasi kawasan hutan dan

sumber air yang vital bagi masyarakat setempat (Wiratmaka dkk, 2021). Pengelolaan limbah yang belum optimal, serta penggunaan air secara berlebihan oleh usaha pariwisata berkontribusi terhadap krisis ekologis yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan aspek sosial budaya, dapat menjadi ancaman nyata terhadap keberlanjutan kawasan tersebut (Spillane, 1985; Pitana & Gayatri dalam Rahman, 2014). Maka dari itu, pengembangan pariwisata yang tidak terencana justru dapat menjadi paradoks pembangunan, di mana aset utama yaitu budaya dan lingkungan menjadi korban dari ekspansi industri itu sendiri.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana dampak pariwisata secara nyata dirasakan oleh masyarakat lokal di Desa Batur Selatan. Kajian ini bertujuan tidak hanya untuk mengidentifikasi sisi positif dari pertumbuhan sektor pariwisata, tetapi juga untuk menggali dampak negatif yang berpotensi menimbulkan ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan pergeseran budaya. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis partisipasi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan pariwisata yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan-tantangan pembangunan di tingkat lokal. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat literatur akademik tentang pentingnya keberimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan realitas sosial secara mendalam, kontekstual, dan menyeluruh berdasarkan pengalaman subjektif informan yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan tujuan utama penelitian, yakni untuk mengkaji bagaimana dampak pariwisata secara nyata dirasakan oleh masyarakat lokal di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, maupun lingkungan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi dinamika sosial yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka atau data kuantitatif,

terutama dalam melihat transformasi kehidupan masyarakat akibat perkembangan pariwisata.

Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* atau sengaja ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Batur Selatan merupakan salah satu kawasan yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam sektor pariwisata di wilayah Kintamani. Lokasi ini memiliki potensi pariwisata alam yang tinggi, seperti pemandangan Gunung dan Danau Batur, hutan desa, serta unsur budaya lokal seperti pura dan upacara keagamaan yang masih hidup dan aktif. Selain itu, kawasan ini juga merupakan bagian dari *Geopark* Batur yang telah diakui oleh *UNESCO*, menjadikannya sebagai destinasi yang tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga secara ekologis dan kultural. Perkembangan pariwisata di desa ini juga telah membawa perubahan dalam struktur ekonomi, pola kerja masyarakat, dan tata kelola ruang, yang menjadikannya sangat relevan untuk dikaji dari sudut pandang dampak terhadap kehidupan lokal.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersifat naratif dan mendalam, serta bertujuan untuk memahami makna dari perspektif pelaku sosial. Data diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari lapangan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangli, peraturan-peraturan pemerintah, laporan kegiatan pariwisata, serta literatur akademik terkait konsep dampak pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Observasi lapangan, untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai aktivitas pariwisata dan interaksi sosial antara masyarakat lokal dan wisatawan, serta untuk mencatat perubahan fisik dan lingkungan di desa.
2. Wawancara mendalam yang dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci seperti Kepala Desa, perangkat desa, pengelola hutan desa, tokoh adat, pelaku usaha pariwisata lokal pemilik *homestay*, *cafe*, penyedia jasa *ATV*, dsb., serta masyarakat yang tidak secara langsung terlibat dalam sektor pariwisata namun terdampak oleh aktivitas tersebut.
3. Studi pustaka, digunakan untuk menelaah konsep-konsep teoritis dan temuan penelitian terdahulu yang relevan, seperti teori dampak pariwisata, pariwisata berbasis masyarakat (*Community-Based Tourism*), dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

4. Dokumentasi, yang meliputi pengumpulan arsip foto, video, data visual, dan dokumen administratif terkait perkembangan pariwisata desa, sebagai pelengkap dan penguat data dari observasi dan wawancara.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam dinamika pariwisata di Desa Batur Selatan. informan awal merekomendasikan informan lain yang relevan untuk diwawancarai. Dengan demikian, diperoleh data dari berbagai perspektif yang mencerminkan kondisi masyarakat secara lebih luas dan beragam.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi data, yakni proses seleksi, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah menjadi informasi yang bermakna dan relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data, yaitu mengorganisasi informasi dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik untuk mempermudah penarikan makna.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu tahap di mana data yang telah dianalisis diinterpretasikan untuk menemukan pola, hubungan antar variabel, dan makna substantif yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, digunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis informan (perangkat desa, pelaku usaha, masyarakat umum), sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan bias dan memastikan bahwa hasil analisis yang diperoleh merupakan refleksi akurat dari kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana pariwisata mempengaruhi kehidupan masyarakat di Desa Batur Selatan, baik dalam bentuk dampak yang menguntungkan maupun yang menimbulkan tantangan sosial, budaya, dan lingkungan. Pendekatan kualitatif yang digunakan memungkinkan peneliti untuk menangkap dimensi-dimensi yang tidak terukur secara statistik, tetapi sangat penting dalam melihat keberlanjutan dan keadilan dalam pembangunan pariwisata di tingkat lokal.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan pariwisata terhadap masyarakat lokal di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dalam studi ini memfasilitasi pemahaman yang utuh dan kontekstual terhadap pengalaman, persepsi, dan respons masyarakat terhadap perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang terjadi akibat pertumbuhan pariwisata di wilayah tersebut. Melalui metode observasi lapangan, wawancara mendalam dengan berbagai aktor seperti pelaku usaha lokal, petani, pemandu wisata, tokoh adat, serta pengurus desa dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi kebijakan dan data sekunder, penelitian ini mengidentifikasi tiga kelompok dampak utama, yaitu dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Setiap kategori dianalisis secara komprehensif, baik dari sisi positif maupun negatif, untuk memberikan gambaran menyeluruh dan berimbang mengenai transformasi yang dialami oleh masyarakat Desa Batur Selatan sebagai akibat dari ekspansi sektor pariwisata.

Pariwisata di Desa Batur Selatan telah menjadi kekuatan utama transformasi masyarakat dalam tiga dimensi utama: ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Ia membuka peluang dan potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkenalkan budaya lokal ke dunia global. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan serius yang perlu diatasi secara hati-hati dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata di desa ini harus dilandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek partisipasi masyarakat, keadilan distribusi manfaat, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Pemerintah desa bersama pemangku kepentingan lainnya perlu menyusun regulasi tata kelola pariwisata yang berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai Tri Hita Karana, serta mengembangkan kapasitas masyarakat dalam manajemen usaha, pengelolaan konflik sosial, dan adaptasi terhadap perubahan global. Dengan langkah-langkah tersebut, Desa Batur Selatan diharapkan dapat menjadi contoh model pengembangan pariwisata desa yang adil, berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

Transformasi ekonomi akibat pariwisata juga berdampak pada pola konsumsi dan orientasi hidup masyarakat lokal. Meningkatnya pendapatan dalam jangka pendek mendorong gaya hidup konsumtif di kalangan sebagian warga, terutama generasi muda yang terpapar budaya luar melalui interaksi dengan wisatawan. Fenomena ini

menciptakan ketergantungan terhadap pendapatan wisata tanpa disertai perencanaan keuangan yang matang maupun investasi jangka panjang. Akibatnya, ketika terjadi penurunan drastis jumlah kunjungan wisata, banyak rumah tangga mengalami kesulitan ekonomi karena tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup atau keterampilan alternatif di luar sektor jasa wisata.

Selain itu, pola migrasi tenaga kerja juga mulai bergeser. Beberapa warga desa yang memiliki keterampilan rendah terpaksa bermigrasi ke kota-kota terdekat untuk mencari pekerjaan lain saat sektor pariwisata desa sedang lesu, sementara pendatang dari luar desa mengisi peluang ekonomi strategis di pusat-pusat wisata lokal. Hal ini memunculkan tantangan baru berupa tekanan terhadap lapangan kerja lokal, perubahan demografi, dan potensi gesekan sosial akibat perebutan sumber ekonomi yang terbatas.

Dalam konteks tersebut, desa perlu memperkuat mekanisme kelembagaan ekonomi, seperti koperasi desa, forum pelaku usaha lokal, dan regulasi desa tentang investasi, agar ekonomi lokal tidak hanya tumbuh secara nominal, tetapi juga mampu menjamin keadilan distribusi dan ketahanan ekonomi jangka panjang. Penataan ulang arah pembangunan ekonomi berbasis prinsip kemandirian, keterlibatan aktif masyarakat dalam rantai pasok, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil merupakan prasyarat mutlak agar desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga subjek yang berdaulat secara ekonomi. Tanpa upaya serius ke arah ini, pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dikhawatirkan hanya akan menghasilkan kemajuan yang rentan runtuh oleh berbagai ancaman.

#### Dampak Pariwisata Terhadap Ekonomi

Sektor ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling awal dan paling nyata mengalami perubahan akibat pertumbuhan pariwisata di Desa Batur Selatan. Di sisi positif, pariwisata telah menjadi katalis utama dalam menciptakan diversifikasi ekonomi lokal yang sebelumnya sangat bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Banyak warga desa yang beralih profesi atau menambah pendapatan melalui usaha pariwisata seperti membuka *homestay*, *cafe*, warung makan, serta menjual cenderamata atau produk kerajinan lokal berbasis kearifan budaya. Keberadaan pelaku pariwisata lokal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga memberikan peluang kerja bagi anggota keluarga lainnya, sehingga



berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 1. Wisatawan Membeli Produk Kerajinan lokal

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Kegiatan ekonomi yang tumbuh pesat ini turut memacu perputaran uang di desa dan mendorong sinergi antar sektor, seperti sektor pertanian yang kembali diberdayakan dalam bentuk agrowisata dan penyedia bahan baku kuliner lokal. Pendapatan dari aktivitas pariwisata juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa, yang pada gilirannya mendanai pembangunan infrastruktur publik seperti jalan desa, serta pusat informasi wisata. Tidak hanya itu, BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) mulai terlibat aktif dalam mengelola paket-paket wisata berbasis komunitas, sehingga meningkatkan posisi tawar desa dalam rantai nilai pariwisata.

Sektor pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat dan desa. Salah satu dampak paling nyata adalah penciptaan lapangan kerja bagi warga lokal. Di Hutan Desa Batur Selatan, terdapat 20 staf tetap dengan penghasilan rata-rata Rp 2.300.000 per bulan, yang mana jumlah ini telah melampaui Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Bangli. Pendapatan ini bukan hanya memberikan kestabilan ekonomi bagi para pekerja, namun juga meningkatkan standar hidup keluarga mereka. Pengelolaan wisata yang dilakukan oleh kelompok Br. Masem Dwi Tirta ini turut mendorong partisipasi langsung masyarakat dalam kegiatan ekonomi, memperkuat kemandirian desa, dan mengurangi ketergantungan pada sektor lain seperti pertanian tradisional yang bersifat musiman.

Dampak positif lainnya terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro di sekitar lokasi wisata. Pemilik *homestay*, warung makan, hingga *cafe* melaporkan peningkatan omzet, khususnya pada musim puncak kunjungan wisatawan. Bahkan sekarang Kintamani menjadi

salah satu destinasi wisata untuk mencari sunrise dengan sambil menikmati secangkir kopi maupun makanan lainnya dari *cafe* yang memiliki view langsung ke Gunung Batur dan Danau Batur. Desa Batur Selatan secara wilayah Administratif memiliki beberapa pilihan *cafe* yang sedang *hits* sekarang diantaranya yaitu *Papperhills*, *Lunamoon*, *Starbuck*, *Montana* dan *Elago*.

Kehadiran wisatawan mendorong daya beli masyarakat dan mempercepat perputaran uang di desa. Selain itu, pariwisata juga menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) dengan tumbuhnya usaha jasa pendukung seperti transportasi lokal, *laundry* wisatawan, serta produksi kerajinan. Kegiatan ini mendorong munculnya ekonomi kreatif yang memanfaatkan potensi lokal, seperti produksi kopi kemasan Kintamani yang kini mulai dikenal luas. Bahkan nilai properti di sekitar area wisata mengalami lonjakan tajam, dari Rp 1 juta menjadi Rp 3,5 juta per meter persegi hanya dalam waktu tiga tahun, menciptakan akumulasi aset yang menguntungkan bagi pemilik lahan. Secara keseluruhan, pariwisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga menjadi motor utama pembangunan desa yang mampu menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat struktur sosial, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut juga membawa dampak negatif yang cukup kompleks dan berlapis. Ketimpangan distribusi manfaat ekonomi pariwisata menjadi isu utama yang seringkali menimbulkan kecemburuan sosial di antara warga desa. Kelompok masyarakat yang memiliki aset seperti tanah di lokasi strategis, akses terhadap modal, serta jaringan bisnis dan koneksi ke pemerintah atau pelaku industri, memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat marginal yang hanya mampu bekerja sebagai buruh musiman atau pelaku usaha informal skala mikro dengan daya saing terbatas. Ketimpangan ini tidak hanya memperlebar kesenjangan ekonomi, tetapi juga mengancam kohesi sosial yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat desa.

Fenomena ini diperparah oleh praktik dominasi pasar oleh investor luar desa yang memiliki kemampuan finansial dan manajerial yang lebih kuat. Kehadiran investor luar seringkali menyebabkan masyarakat lokal kehilangan kendali atas aset strategis desa, baik dalam bentuk lahan, sumber daya air, maupun aksesibilitas ke destinasi utama. Sebagian besar akomodasi berstandar menengah dan atas dikuasai oleh pemilik dari luar daerah, sehingga keuntungan ekonomi yang dihasilkan tidak sepenuhnya berputar dalam ekonomi lokal, melainkan justru mengalami kebocoran (*leakage*). Ini

membuat desa hanya menjadi tempat konsumsi ekonomi, bukan pengendali utama manfaatnya.

Ketergantungan masyarakat terhadap sektor pariwisata juga menyebabkan struktur ekonomi desa menjadi rapuh terhadap guncangan eksternal, seperti bencana alam, fluktuasi jumlah wisatawan, atau perubahan kebijakan pariwisata. Selama masa pandemi, banyak usaha tutup, pengangguran meningkat, dan ketahanan ekonomi rumah tangga menurun drastis, menunjukkan belum kuatnya fondasi ekonomi alternatif di luar pariwisata. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa dan para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi jangka panjang yang mengedepankan diversifikasi ekonomi, penguatan kapasitas UMKM lokal, dan inklusivitas dalam distribusi manfaat ekonomi. Model pengembangan ekonomi berbasis komunitas (*community-based economic development*) menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk memastikan bahwa pariwisata benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sebaliknya menjadi sumber ketimpangan dan eksklusivitas sosial.

Lebih jauh, transformasi ekonomi akibat pariwisata juga berdampak pada pola konsumsi dan orientasi hidup masyarakat lokal. Meningkatnya pendapatan dalam jangka pendek mendorong gaya hidup konsumtif di kalangan sebagian warga, terutama generasi muda yang terpapar budaya luar melalui interaksi dengan wisatawan. Fenomena ini menciptakan ketergantungan terhadap pendapatan wisata tanpa disertai perencanaan keuangan yang matang maupun investasi jangka panjang. Akibatnya, ketika terjadi penurunan drastis jumlah kunjungan wisata, banyak rumah tangga mengalami kesulitan ekonomi karena tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup atau keterampilan alternatif di luar sektor jasa wisata.

Selain itu, pola migrasi tenaga kerja juga mulai bergeser. Beberapa warga desa yang terpaksa memilih untuk bermigrasi ke kota-kota terdekat untuk mencari pekerjaan lain saat sektor pariwisata desa sedang lesu, sementara pendatang dari luar desa mengisi peluang ekonomi strategis di pusat-pusat wisata lokal. Hal ini memunculkan tantangan baru berupa tekanan terhadap lapangan kerja lokal, perubahan demografi, dan potensi gesekan sosial akibat perebutan sumber ekonomi yang terbatas.

Dalam konteks tersebut, desa perlu memperkuat mekanisme kelembagaan ekonomi, seperti koperasi desa, forum pelaku usaha lokal, dan regulasi desa tentang investasi, agar ekonomi lokal tidak hanya tumbuh secara nominal, tetapi juga mampu menjamin keadilan distribusi dan ketahanan ekonomi jangka panjang. Penataan ulang arah

pembangunan ekonomi berbasis prinsip kemandirian, keterlibatan aktif masyarakat dalam rantai pasok, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil merupakan prasyarat mutlak agar desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga subjek yang berdaulat secara ekonomi. Tanpa upaya serius ke arah ini, pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dikhawatirkan hanya akan menghasilkan kemajuan yang rentan runtuh oleh berbagai ancaman.

### Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Budaya

Aspek sosial budaya merupakan dimensi yang mengalami perubahan transformatif sebagai akibat dari berkembangnya industri pariwisata di Desa Batur Selatan. Dari sisi positif, meningkatnya kunjungan wisatawan telah mendorong masyarakat untuk kembali menghargai dan melestarikan budaya lokal mereka. Tradisi seperti upacara keagamaan, pertunjukan tari dan musik tradisional, serta kerajinan tangan, mengalami revitalisasi karena mendapat perhatian dari wisatawan. Banyak anak muda yang sebelumnya enggan mengikuti pelatihan tari atau memainkan gamelan, kini aktif kembali karena mendapat insentif ekonomi dan kebanggaan sosial dari tampil dalam acara-acara budaya. Identitas budaya lokal tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diposisikan ulang dalam konteks global sebagai aset ekonomi dan simbol kebanggaan komunal. Interaksi yang intensif dengan wisatawan dari berbagai negara juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dalam berbahasa asing, mengelola komunikasi lintas budaya, serta menumbuhkan sikap keterbukaan dan toleransi terhadap perbedaan.



Gambar 2. Interaksi Antara Wisatawan dengan Masyarakat lokal

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Bentuk komersialisasi ruang juga mulai terlihat dengan dirubahnya sebagian lahan rumah warga menjadi *homestay* untuk menampung wisatawan, terkhususnya saat musim kunjungan

meningkat. Adaptasi ruang tinggal menjadi ruang komersial ini menunjukkan fleksibilitas masyarakat dalam mengelola aset yang dimiliki secara produktif. Tidak hanya itu, pengadaan lahan parkir secara swadaya oleh warga di sekitar lokasi wisata turut mendukung kenyamanan dan aksesibilitas pengunjung, sekaligus menjadi sumber penghasilan tambahan bagi pemilik lahan.

Transformasi ini menciptakan diversifikasi ekonomi yang memperkecil kesenjangan antar lapisan masyarakat dan membuka peluang inklusi sosial, terutama bagi perempuan dan generasi muda yang kini lebih terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif. Peran aktif generasi muda dalam sektor pariwisata juga memicu kesadaran terhadap pentingnya penguasaan bahasa asing, teknologi, serta keterampilan pelayanan. Hal ini pada gilirannya mendorong lahirnya berbagai inisiatif pelatihan formal maupun informal di desa yang berdampak positif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Meskipun demikian, transformasi ini tetap memberi kontribusi besar terhadap diversifikasi ekonomi lokal, memperkecil ketergantungan masyarakat terhadap sektor agraris, dan membuka peluang inklusi sosial. Perempuan yang dulunya hanya berkulat diranah domestik kini turut ambil bagian dalam pengelolaan *homestay*, dan pelayanan kuliner. Generasi muda juga semakin aktif dalam sektor pariwisata, baik sebagai pengelola usaha, pemandu wisata, atau tenaga pelayanan. Peran aktif ini memicu kesadaran terhadap pentingnya penguasaan bahasa asing, literasi digital, dan keterampilan layanan wisata, yang pada gilirannya mendorong lahirnya berbagai inisiatif pelatihan formal maupun informal, seperti kursus bahasa Inggris, pelatihan barista, hingga digital marketing. Dengan demikian, komersialisasi ruang tidak hanya berdampak pada ekonomi rumah tangga, tetapi juga menjadi pemicu tumbuhnya kualitas sumber daya manusia di desa secara lebih luas.

Transformasi ini juga mendorong lahirnya berbagai bentuk lembaga pelatihan berbasis masyarakat. Beberapa LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) mulai bermunculan khususnya di Kabupaten Bangli, memberikan pelatihan keterampilan bahasa asing, pelayanan tamu (*hospitality*), tata boga, dan pemanduan wisata. Kehadiran LPK ini memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal agar mampu bersaing dalam sektor pariwisata, serta menciptakan peluang kerja bagi generasi muda dan perempuan. Bahkan, sejumlah pelatihan yang difasilitasi oleh LPK telah menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, seperti Dinas Pariwisata, maupun pelaku industri pariwisata, untuk memastikan relevansi kurikulum dan potensi penyerapan tenaga kerja.

Namun demikian, perkembangan ini juga membawa dampak negatif terhadap struktur dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Salah satu

dampak yang paling mencolok adalah terjadinya komodifikasi budaya, di mana elemen-elemen budaya yang seharusnya bersifat sakral dan dijalankan dalam konteks keagamaan atau adat, mulai dikemas dan dijadwalkan ulang demi kepentingan komersial. Misalnya, upacara adat yang biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu dengan tujuan spiritual, diubah waktunya untuk menyesuaikan dengan jadwal wisatawan, sehingga mengurangi nilai kesakralannya. Perubahan ini memicu perdebatan di kalangan tokoh adat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai batas-batas adaptasi budaya dalam konteks pariwisata. Selain itu, gaya hidup *konsumerisme* yang diperkenalkan oleh wisatawan, seperti cara berpakaian, pola konsumsi, dan kebiasaan sosial, mulai memengaruhi generasi muda. Mereka menjadi lebih individualistik dan mulai menjauh dari aktivitas sosial komunal serta tanggung jawab adat, yang dalam jangka panjang dapat mengancam keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal. Ketegangan antargenerasi pun mulai muncul, terutama antara kelompok tua yang ingin mempertahankan nilai-nilai tradisional dan kelompok muda yang lebih pragmatis dalam memandang modernitas.

Perubahan sosial budaya merupakan salah satu dampak paling signifikan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Batur Selatan seiring berkembangnya sektor pariwisata. Transformasi ini tidak hanya mencakup aspek permukaan seperti gaya hidup dan interaksi sosial, tetapi juga menyentuh struktur nilai, praktik budaya, dan identitas kolektif masyarakat lokal. Di tengah arus globalisasi dan eksposur terhadap budaya luar yang dibawa oleh wisatawan, masyarakat perlahan mengalami proses negosiasi identitas, di mana budaya tradisional mulai dilihat bukan semata sebagai warisan leluhur, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai jual. Dalam proses ini, muncul kesadaran baru di kalangan warga, terutama generasi muda, tentang pentingnya melestarikan tradisi sebagai bagian dari daya tarik wisata.

Kegiatan budaya seperti ritual keagamaan, pertunjukan seni tari dan gamelan, serta kerajinan tangan khas Bali mulai kembali dihidupkan dan dikemas secara lebih menarik untuk ditampilkan di hadapan wisatawan. Anak-anak muda yang sebelumnya kurang tertarik terhadap tradisi lokal kini mulai terlibat dalam pelatihan dan pementasan, bahkan menjadi bagian dari komunitas seni yang aktif. Fenomena ini menjadi sinyal positif bahwa pariwisata mampu menjadi alat revitalisasi budaya, di mana simbol-simbol tradisional tidak lagi ditinggalkan, tetapi justru dijaga dan dimodernisasi tanpa kehilangan makna aslinya. Selain itu, interaksi yang intensif dengan wisatawan juga turut

membentuk masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan budaya, menumbuhkan toleransi, serta memperluas perspektif tentang dunia luar. Perubahan ini, meski membawa tantangan, juga memperlihatkan potensi besar pariwisata sebagai jembatan antara pelestarian budaya dan modernitas yang inklusif.

Meskipun pariwisata memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Batur Selatan, terdapat pula sejumlah dampak negatif yang patut menjadi perhatian, terutama dalam aspek sosial dan budaya. Pertumbuhan sektor pariwisata yang pesat kerap memicu ketimpangan ekonomi antar warga. Mereka yang memiliki akses lebih awal terhadap informasi, modal, atau lahan strategis cenderung memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan warga yang tidak memiliki sumber daya tersebut. Ketimpangan ini dapat menciptakan kecemburuan sosial, merusak solidaritas antar masyarakat, dan bahkan memunculkan potensi konflik horizontal di dalam komunitas desa. Selain itu, tekanan terhadap masyarakat untuk mengikuti gaya hidup konsumtif akibat interaksi dengan wisatawan juga berisiko menggeser nilai-nilai tradisional menjadi lebih materialistis. Masyarakat yang dahulu hidup sederhana dan mengedepankan gotong royong kini mulai terfragmentasi oleh semangat kompetisi ekonomi.

Namun dibalik manfaat positifnya, proses komersialisasi ruang juga membawa tantangan tersendiri. Ketimpangan akses terhadap ruang strategis mulai memunculkan kesenjangan antar warga, karena tidak semua masyarakat memiliki rumah atau lahan di lokasi yang dekat dengan pusat keramaian wisata. Mereka yang tinggal di bagian dalam desa atau tidak memiliki aset fisik yang bisa dikomersialisasikan merasa tertinggal dari segi peluang ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan melemahkan rasa solidaritas yang sebelumnya kuat dalam struktur sosial desa.

Dorongan untuk menjadikan tradisi sebagai komoditas pariwisata dapat mengakibatkan degradasi makna budaya lokal. Kegiatan-kegiatan adat yang sebelumnya dilakukan dengan landasan spiritual bisa berubah menjadi sekadar pertunjukan demi menarik minat wisatawan, kehilangan keaslian dan kedalaman maknanya. Anak-anak muda yang sebelumnya aktif dalam kegiatan Sekaa Teruna atau upacara adat mulai enggan terlibat karena lebih memilih pekerjaan yang cepat menghasilkan uang di sektor pariwisata.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan pudarnya regenerasi budaya di masa depan. Lebih jauh lagi, kehadiran wisatawan asing maupun domestik yang tidak selalu memahami norma lokal berpotensi menimbulkan gesekan budaya. Contohnya seperti cara berpakaian yang tidak sesuai dengan adat Bali atau perilaku wisatawan yang kurang

menghormati tempat-tempat suci. Sementara itu, dari sisi lingkungan hidup, arus wisatawan yang tinggi memberi tekanan tambahan terhadap ekosistem. Sampah plastik, kebisingan, dan penurunan kualitas udara menjadi konsekuensi yang mengancam kualitas lingkungan desa. Apabila tidak dikelola dengan prinsip berkelanjutan, dampak-dampak ini bisa merusak daya tarik desa itu sendiri dalam jangka panjang. Maka, penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk membangun sistem tata kelola pariwisata yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan demi keberlangsungan desa secara utuh.

### Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan

Perkembangan pariwisata di Desa Batur Selatan memberikan kontribusi yang besar terhadap pelestarian lingkungan, khususnya melalui pendekatan berbasis ekowisata yang menekankan pada keberlanjutan dan konservasi. Salah satu perubahan paling mencolok adalah revitalisasi kawasan hutan desa yang sebelumnya terabaikan dan bahkan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah liar oleh sebagian masyarakat. Sejak hutan tersebut diubah menjadi destinasi wisata berbasis alam pada tahun 2018 oleh kelompok masyarakat lokal Br. Masem Dwi Tirta, paradigma masyarakat terhadap fungsi dan nilai hutan mengalami pergeseran yang sangat positif. Hutan yang dulunya dipandang sebagai lahan kosong kini dianggap sebagai aset berharga yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan.

Transformasi ini telah berhasil menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif terhadap kawasan hutan, sekaligus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan konservasi seperti penanaman pohon, pembersihan area wisata, dan pengelolaan sampah yang lebih sistematis. Pengelola wisata secara rutin menyelenggarakan program edukasi lingkungan yang melibatkan masyarakat dan pengunjung untuk memahami pentingnya menjaga ekosistem hutan sebagai penyangga kehidupan dan sumber daya pariwisata.

Pembangunan fasilitas wisata di kawasan ini telah dirancang sedemikian rupa agar tetap menjaga kelestarian lingkungan, seperti membangun wahana non permanen dan memanfaatkan jalur alami untuk aktivitas petualangan seperti *ATV* dan *flying fox*. Konsep ini tidak hanya mengurangi dampak ekologis, tetapi juga memperkuat daya tarik wisata berbasis alam. Sementara itu, penggunaan tiket masuk sebagai salah satu sumber dana untuk kegiatan konservasi turut menciptakan model ekonomi lingkungan yang berkelanjutan. Komitmen masyarakat terhadap lingkungan juga terlihat dalam sikap kolektif untuk menolak aktivitas wisata yang merusak, seperti larangan membuang sampah sembarangan dan pembatasan pembangunan di area sensitif. Kesadaran ini menunjukkan bahwa pariwisata telah



menjadi pintu masuk untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Keberhasilan ini menciptakan contoh baik tentang bagaimana pariwisata tidak selalu identik dengan eksploitasi, tetapi justru dapat menjadi alat pelestarian apabila dikelola dengan prinsip keberlanjutan. Dengan dukungan regulasi, pendidikan lingkungan, serta pengawasan yang ketat, dampak positif pariwisata terhadap lingkungan di Desa Batur Selatan akan terus tumbuh dan dapat dijadikan model untuk pengembangan destinasi wisata alam di wilayah lain.

Keberhasilan revitalisasi kawasan hutan dan pengelolaan ekowisata di Desa Batur Selatan layak diapresiasi, keberlanjutan dampak positif tersebut sangat bergantung pada konsistensi kolaborasi antar pemangku kepentingan lokal. Pemerintah desa, kelompok pengelola wisata, tokoh adat, dan masyarakat umum harus terus memperkuat sistem koordinasi dan pengawasan lingkungan. Salah satu tantangan tersembunyi yang mulai muncul adalah meningkatnya tekanan terhadap zona-zona alami karena bertambahnya jumlah wisatawan dan aktivitas komersial. Jika tidak diantisipasi sejak dini, hal ini dapat memicu degradasi lingkungan secara perlahan dan mengancam daya dukung ekologis kawasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan tata ruang yang ketat berbasis kajian lingkungan, serta sistem zonasi yang jelas untuk membatasi aktivitas wisata di area yang rentan atau sakral.

Selain itu, dibutuhkan mekanisme evaluasi dampak lingkungan secara berkala yang melibatkan partisipasi warga, termasuk generasi muda yang kini telah memiliki posisi strategis dalam dinamika pariwisata. Partisipasi generasi muda tidak boleh berhenti pada tataran operasional seperti pemanduan wisata atau pelatihan, namun perlu diperluas ke arah perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data lingkungan. Dengan melibatkan mereka dalam proses monitoring vegetasi, dan kebersihan kawasan generasi muda tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga penjaga kesinambungan ekosistem lokal. Pendekatan ini akan memperkuat rasa kepemilikan jangka panjang terhadap sumber daya alam yang dikelola secara kolektif.

Lingkungan fisik dan ekosistem alami di Desa Batur Selatan turut mengalami dampak yang signifikan akibat intensifikasi aktivitas pariwisata. Di sisi positif, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan terlihat dari berbagai inisiatif lokal dalam menjaga kebersihan desa, memperbaiki jalur ATV, serta merehabilitasi kawasan hutan yang sebelumnya rusak. Beberapa kelompok dan komunitas lingkungan aktif melakukan kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, dan penyediaan edukasi lingkungan bagi

wisatawan maupun warga. Inisiatif ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran ekologis yang tidak hanya dipicu oleh kebutuhan wisata, tetapi juga oleh dorongan moral untuk melindungi warisan alam yang menjadi bagian dari identitas desa. Di beberapa lokasi, konsep ekowisata mulai diterapkan secara bertahap, dengan prinsip-prinsip partisipatif dan konservatif yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.



Gambar 3. Pembersihan dan Perawatan Jalur ATV  
Sumber : Hasil Penelitian 2025

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tekanan terhadap daya dukung lingkungan terus meningkat. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya volume sampah, terutama plastik dan limbah nonorganik dari aktivitas wisata seperti makanan kemasan, botol minuman, dan alat kebersihan sekali pakai. Sistem pengelolaan sampah di desa belum mampu mengimbangi peningkatan tersebut. Fasilitas TPS (Tempat Pembuangan Sementara) masih terbatas, dan masyarakat belum sepenuhnya terbiasa dengan pola pemilahan sampah. Pembuangan limbah ke sungai dan pembakaran terbuka masih sering dilakukan, yang menyebabkan pencemaran udara dan kualitas air menurun. Selain itu, pembangunan fasilitas wisata yang tidak memperhatikan tata ruang dan keberlanjutan lingkungan menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi *homestay*, restoran, dan area parkir, yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan merusak lanskap alami desa. Pengambilan air tanah secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan *homestay* dan hotel menyebabkan penurunan cadangan air bersih, terutama di musim kemarau, serta menimbulkan konflik antara pelaku usaha dan masyarakat petani. Kerusakan jalan desa akibat kendaraan wisatawan, polusi suara, dan penurunan kualitas udara di titik-titik wisata ramai juga menjadi isu yang perlu segera direspons secara sistematis.

Dampak-dampak tersebut mengindikasikan bahwa pariwisata di Desa Batur Selatan telah berada pada titik kritis antara peluang pelestarian dan

ancaman kerusakan ekologis. Ketidakseimbangan antara pengembangan pariwisata dan kapasitas lingkungan untuk menyerap beban aktivitas manusia dapat mengakibatkan kerusakan permanen yang tidak hanya mengganggu fungsi ekologis, tetapi juga menurunkan nilai jual pariwisata itu sendiri di mata wisatawan yang kini semakin sadar akan isu-isu keberlanjutan. Dalam jangka panjang, degradasi kualitas lingkungan berpotensi menurunkan daya saing destinasi, terutama jika tidak dibarengi dengan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang strategis.

Selain masalah teknis seperti pengelolaan limbah dan konservasi lahan, tantangan besar lainnya adalah lemahnya tata kelola lingkungan yang partisipatif. Belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyusun peraturan lingkungan serta minimnya sanksi terhadap pelanggaran tata ruang menjadi hambatan nyata dalam pengendalian dampak lingkungan. Sering kali, pembangunan fasilitas wisata dilakukan secara sporadis dan tidak berbasis pada perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan daya dukung ekologis kawasan. Ini menunjukkan urgensi penguatan kapasitas kelembagaan desa dalam perencanaan spasial dan pengawasan lingkungan secara berkelanjutan.

Lebih jauh, minimnya edukasi berkelanjutan terhadap wisatawan juga memperparah situasi. Banyak pengunjung yang masih belum memahami atau tidak diberikan informasi memadai mengenai tata tertib lingkungan selama berwisata, seperti larangan membuang sampah sembarangan atau pentingnya menjaga ketenangan kawasan hutan dan danau. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi dalam bentuk pemasangan papan informasi, pelibatan pemandu lokal dalam edukasi lingkungan, hingga insentif bagi usaha wisata yang menerapkan prinsip ramah lingkungan.

Dengan demikian, jika tidak segera diantisipasi secara menyeluruh dan sistematis, maka aktivitas pariwisata berisiko menjadi penyebab utama terjadinya krisis ekologis di kawasan desa ini. Strategi ideal yang dapat diadopsi mencakup: penguatan regulasi tata ruang berbasis daya dukung lingkungan, revitalisasi kawasan lindung desa, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis komunitas. Selain itu, pemanfaatan teknologi tepat guna seperti biopori, sumur resapan, pengolahan air limbah sederhana, dan pemanenan air hujan juga dapat menjadi solusi jangka menengah yang adaptif terhadap perubahan iklim.

#### IV. KESIMPULAN

##### Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pariwisata di Desa Batur Selatan membawa dampak yang sangat kompleks dan multidimensional terhadap masyarakat lokal. Dampak tersebut mencakup dimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, yang masing-masing memiliki sisi positif dan negatif. Secara keseluruhan, pariwisata telah mendorong perubahan signifikan terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat dan tata ruang wilayah desa.

Dari sisi ekonomi, pariwisata telah terbukti menjadi sektor yang sangat potensial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong tumbuhnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Diversifikasi pendapatan melalui aktivitas wisata seperti *homestay*, jasa pemandu, perdagangan suvenir, serta usaha kuliner telah mengangkat taraf hidup sebagian besar masyarakat. Pertumbuhan ekonomi lokal juga menciptakan *multiplier effect*, di mana keuntungan dari sektor wisata turut memicu perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi ini tidak merata dan cenderung hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, terutama mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya seperti modal dan informasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan antar warga. Selain itu, ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap sektor pariwisata menjadikan desa rentan terhadap fluktuasi jumlah wisatawan akibat bencana alam, pandemi, maupun krisis global.

Dari aspek sosial budaya, pariwisata memberi ruang revitalisasi budaya lokal dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan tradisi dan identitas budaya. Seni pertunjukan, ritual adat, dan kerajinan tangan kembali dihargai sebagai aset budaya dan sumber penghasilan. Interaksi dengan wisatawan juga memperkaya wawasan masyarakat lokal, terutama generasi muda, dalam beradaptasi dan menjalin relasi dengan dunia luar. Namun demikian, komodifikasi budaya yang berlebihan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya degradasi nilai-nilai luhur budaya Bali. Elemen-elemen budaya yang sebelumnya bersifat sakral kini cenderung ditampilkan demi kepentingan konsumsi wisata, yang dalam jangka panjang dapat merusak makna dan integritas budaya lokal. Perubahan nilai dan gaya hidup yang diadopsi dari wisatawan juga berdampak terhadap pola interaksi sosial dan struktur relasi kekeluargaan, yang berisiko mengikis solidaritas tradisional masyarakat.

Dari sisi lingkungan, pariwisata memunculkan kesadaran ekologis dan berbagai inisiatif pelestarian lingkungan yang digerakkan oleh komunitas lokal. Program penghijauan, pengelolaan sampah terpadu, dan pengembangan ekowisata

merupakan indikasi bahwa masyarakat mulai aktif menjaga lingkungan sebagai bagian integral dari daya tarik wisata desa. Namun, tekanan terhadap daya dukung lingkungan juga semakin berat akibat peningkatan jumlah wisatawan dan pembangunan infrastruktur pariwisata yang tidak selalu berorientasi pada keberlanjutan. Volume sampah yang meningkat, alih fungsi lahan, degradasi hutan, dan eksploitasi sumber daya air menjadi tantangan serius yang mengancam kelestarian alam Desa Batur Selatan. Tanpa perencanaan tata ruang yang matang dan sistem pengelolaan lingkungan yang terintegrasi, pariwisata berpotensi menjadi beban ekologis yang merusak aset utama desa itu sendiri.

Secara keseluruhan, pariwisata di Desa Batur Selatan merupakan fenomena yang penuh potensi sekaligus penuh risiko. Diperlukan tata kelola yang bijak dan partisipatif agar dampak positif yang ditimbulkan dapat dimaksimalkan, sementara dampak negatifnya dapat diminimalisasi. Pemerintah desa dan pemangku kepentingan harus menyusun strategi pengembangan pariwisata yang berbasis komunitas, berorientasi pada keadilan sosial, dan berpijak pada prinsip keberlanjutan lingkungan. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat lokal mengenai pengelolaan pariwisata, pelestarian budaya, serta konservasi lingkungan sangat penting untuk memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi dinamika global.

Dengan pengelolaan yang tepat, Desa Batur Selatan dapat menjadi contoh sukses pengembangan desa wisata yang tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga keutuhan budaya dan kelestarian alam. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan pariwisata ke depan harus bersifat holistik, interdisipliner, dan berbasis nilai-nilai lokal seperti Tri Hita Karana, yang menempatkan keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas sebagai pondasi utama dalam mengelola perubahan.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak negatif pariwisata terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan di Desa Batur Selatan, diperlukan strategi mitigasi yang terarah, partisipatif, dan berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa langkah strategis dapat diterapkan. Pertama, dalam aspek ekonomi, pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan usaha, terutama bagi mereka yang masih bergantung pada sektor tradisional seperti pertanian, agar mampu beradaptasi dengan peluang dari sektor pariwisata, seperti pengembangan kuliner lokal, *homestay*, dan produk kerajinan.

Selain itu, pendirian koperasi pariwisata yang dikelola oleh masyarakat lokal dapat menjadi solusi untuk menciptakan distribusi ekonomi yang lebih

adil dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Kedua, dalam upaya penguatan nilai dan budaya lokal, disarankan adanya penyusunan kode etik pariwisata berbasis budaya lokal guna menjaga kesakralan upacara dan simbol budaya agar tidak terkomodifikasi secara berlebihan, serta peningkatan literasi budaya melalui program edukasi yang menyasar generasi muda dan wisatawan. Ketiga, pengelolaan lingkungan berkelanjutan harus dilakukan melalui penegakan regulasi zonasi wisata agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian atau kerusakan kawasan hutan, serta penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, khususnya terkait limbah anorganik dari aktivitas wisata.

Keempat, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah desa dan lembaga adat, dengan menyusun dan mengesahkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan, serta memberikan ruang yang lebih strategis bagi lembaga adat dalam proses pengambilan keputusan. Terakhir, peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi kunci keberhasilan mitigasi, yang dapat diwujudkan melalui pelibatan aktif warga dalam setiap tahap perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pariwisata, serta melalui kampanye rutin tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan, baik kepada masyarakat lokal maupun wisatawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F., Damanik, J., Fandeli, C., & Sudarmadji, S. (2015). Perkembangan Destinasi Pariwisata dan Kualitas Hidup Masyarakat Lokal. dan Pembangunan, 31(2), 339-350
- Afandi, R. L., & Alie, M. M. (2015). Kajian pengaruh keberadaan kawasan wisata Sangiran terhadap aspek fisik, aspek ekonomi, dan aspek sosial masyarakat. Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota), 4(2), 282-292.
- Asmoro, A. Y., Yusrizal, F., & Saputra, I. (2021). Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Sekapuk: Sebuah *Participatory Action Research*. JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat). 8(1), 30-47
- Kurniawan, W. (2015). Dampak sosial ekonomi pembangunan pariwisata umbul sidomukti kecamatan bandungan kabupaten semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 4(4), 443-451.
- Lazuardina, A., & Ghassani, S. A. (2023). Dampak pariwisata terhadap kehidupan masyarakat lokal di kawasan wisata. *Journals ITB*.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1994). *Qualitative data analysis second edition*. India: SAGE Publications.
- Nawangsari, E. R., & Rahmatin, L. S. (2022). Tantangan dan Peluang Pariwisata Berbasis Masyarakat di Era *New Normal*. Masyarakat Indonesia, 4(7), 91-104.
- Paramitasari, I. D. (2010). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal (Studi Kasus: Kawasan Wisata Dieng Kabupaten Wonosobo).
- Peraturan Pemerintah Nomer 50 Pasal 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2015
- Paramitasari, I. D. (2010). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal (Studi Kasus: Kawasan Wisata Dieng Kabupaten Wonosobo).
- Pitana dan Diarta. 2009. Pengantar ilmu pariwisata. Yogyakarta: andi offset
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press
- Rahman, Y., & Muktialie, M. (2014). Pengaruh Aktivitas Pariwisata Pantai Taplau Kota Padang Terhadap Ekonomi, Sosial Masyarakat, dan Lingkungan. *Jurnal Teknik PWK*, 3(4), 979-990.
- Riyadi. (2002). Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia.
- Safitri, Y. A., & Sukana, M. (2013). Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Kegiatan Kepariwisata di Desa Jatiluwih Kabupaten Tabanan. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 1(1), 44-53
- Spillane. (1985). Ekonomi pariwisata, Sejarah dan Prospeknya, Yogyakarta: Kanisius
- Suansri, P. (2003). *Community based tourism handbook (pp. 11-14)*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour-REST.
- Sudiartini, N. W. A., Mulyani, P. A., & Rahman, Y. (2020). Strategi Pengembangan pariwisata Melalui Tradisi Budaya Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Adat Asak Karangasem. *Jurnal Sewaka Bhakti*, 4(1), 1-20
- Suharto dan Edi. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta.
- Titis A. M, Dkk. (2017). Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Alam Telaga Ngebel dalam Meningkatkan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.
- Wahab, A.A.(2008). Metode dan Model-Model Mengajar. Bandung: P.T. Alfabeta.
- Wiratmaka I Gede dkk. (2021). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Geopark Batur di Kintamani Kabupaten Bangli. *JUMPA Volume.ojs.unud*.
- Yoeti A. Oka, (2008). Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata. Pradnya Paramita. Jakarta.